

Prof Dr Jusuf Irianto, Drs, M.Com dan Gitadi Tegas S. (Ketua program doctoral pengembangan SDM)

Sesi 2. Konsep Analisis Kebijakan Publik

- a. Definisi, Pengertian, Teori dan Masalah Kebijakan
- b. Ruang Lingkup Kebijakan
- c. Konsep Analisis Kebijakan (Policy Formulation, Policy Implementation, Policy Review)

Konseptor Kebijakan Publik yang terkenal

- a. Thomas R.Dye "Anything to do or not to do"
- b. William Dunn "Disiplin ilmu social terapan yang menggunakan berbagai metode argument dan transformasi informasi yang relevan dalam suatu setting politik untuk memecahkan problem public/kebijakan

Konsepsi kebijakan harus dilihat dari konteks kehidupan sehari-hari, dan harus dilihat konsekuensinya serta dampaknya. Konsep pembenahan kebijakan harus dimulai dari bawah. Dan kebijakan tersebut harus memiliki dua idealism penting; Conceptability and Adaptability

Pada dasarnya untuk menjadi policy analyst harus menggabungkan data dan teori dengan dilandasi oleh research. Jadi hasilnya merupakan keputusan yang bisa diterapkan dan sudah diujicobakan. Pikiran Rasional menjadi dasar utama bagi seorang analis kebijakan. Kebijakan Public harus based on research. Faktor-faktor penting dalam kebijakan;

- a. Tujuan kebijakan
- b. Sebab Akibat kebijakan
- c. Instrumen kebijakan
- d. Sasaran kebijakan
- e. Implementasi kebijakan

Pengambil kebijakan harus merupakan refleksi dari diri sendiri dan sebagai wakil itu sendiri. Sehingga pengambil kebijakan diharapkan memiliki 2 kemampuan berikut ini:

Regulatory Impact Analysis (RIA)

- 1. Punya kompetensi akses ke informasi/data
- 2. Punya kemampuan dalam perspektif social
- 3. Punya kemampuan teknis dalam memprediksi
- 4. Punya pemahaman Politik
- 5. Mempunyai Etika

Stakeholder Analysis (SA)

Teknis pemetaan terhadap actor yang berhubungan dan mempunyai pengaruh kuat terhadap pengambilan kebijakan. Kebijakan ini memilih /memetakan siapa actor dari komunitas yang punya

kekuatan legal, interest (kepentingan), dan influence (pengaruh). Ke-3 aktor ini harus dipetakan secara detail. Aktor yang punya ke-3nya ini jangan sampai ditinggalkan sebagai bagian penting proses kebijakan.

Kasus dalam sektor kesehatan bisa dilihat dari matriks 2kali2 berupa kekuatan dan interes (kuat dan interes tinggi, lemah tapi interes tinggi, lemah dan interes rendah, serta kuat tetapi interes rendah). Dari sinilah latihan sebagai policy analis bisa dikerjakan. Untuk mendapatkan pola kebijakan yang conceptable dan adaptable. Perubahan kebijakan harus mempunyai impact di Environment, Strategy and Performance yang merubah masyarakat dari situasi yang statis ke dinamis, dari situasi simple ke kompleks, dari richness ke poorness. Dari perubahan ini muncul suatu competitiveness.

Sesi 3: Kebijakan di Bidang Kesehatan sebagai Kebijakan Publik

Prof Dr Jusuf Irianto, Drs, M.Com dan Gitadi Tegas S. (Ketua program doctoral pengembangan SDM)

Penyusunan Policy Brief

Merupakan pernyataan ilmiah yang sifatnya singkat (short) neutrsl summary tentang suatu isu atau masalah tertentu. Biasanya digunakan di pemerintah atau industry. Konten PB meliputi masalah public yang telah mempengaruhi atau dipengaruhi pemerintah.

Komponen Policy Brief:

1. Executive summary
2. Statement of issue/problem
3. Background
4. Statement of your organizations interest in the issue
Meningatkan alasan tertentu
5. Pre existing policies
Sasaran tembaknya sudah ada kebijakan tetapi masih ada masalah. Kebijakan yang sudah ada di pilah. Tegaskan kembali instrumen alternative yang idasumsikan efektif dalam mengatasi masalah.
6. Policy option
Mengembangkan policy courses of action or inaction yang diperlukan. Menyajikan pembaca setidaknya tiga potential courses of action. Uraian dengan rinci masing-masing alternative dengan bahasa yang lugas dan istilah yang mudah dipahami. sangat subyektif sehingga muncul minimal 3 alternatif pilhan.
7. Advatage and disadvantage each policy option
8. Recommendation
9. Sourced consulted or recomended
10. Lampiran

Hal yang paling essential dalam Policy Brief yaitu menentukan substantif problem.

Contoh bila kita menemukan jumlah kematian bayi, kegagalan kebijakan pemerintah. Hal ini berkaitan dengan publik policy yaitu tindakan pemerintah dalam merespon masalah masyarakat. Contoh media Kompas biasanya mengumpulkan dan mengelompokkan public problem. Disini berhubungan kebijakan dengan alatnya atau tujuan di mana kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah.

Real problem di kesehatan → Adanya hidden agenda

Policy analis harus mengamati hidden agenda. Apakah benar calon bupati yg menjual kesehatan peduli terhadap kesehatan. Karena disini ada hidden agenda. Istimahnya adalah jualan. Yang paling banyak di jual adalah pendidikan dan kesehatan.

Kita sering gagal karena memecahkan masalah yang salah. *We fail more often because we solve the wrong problem than because we get the wrong solution to the right problem* (Russel Ackoff).

Kesulitan kita adalah menemukan masalah yang benar kita membutuhkan stakeholder analisis. Ada tiga hal yang perlu diperhatikan menghasilkan policy yang efektif:

1. Agenda setting
2. Problem structuring
3. Policy formulation

Rekomendasi kebijakan public biasanya jamak tidak pernah tunggal sehingga ada alternatif-alternatif yang dihasilkan.

Salah satu kunci kata dalam kebijakan public adalah komprehensivitas yang terdiri dari:

1. Teori → teori kebijakan banyak referensinya
2. Solusi
 - a. Stakeholder atau tokoh
 - b. Metode social marketing
 - c. Konsultan professional

Mengapa SBY memasukkan anak mantan presiden terdahulu sebagai Tim khusus:

1. Political accommodation
2. Political survivality

Dari dua hal tersebut memunculkan policy dynasty yang memperhatikan keberlangsungan kekuasaan.

Korea Selatan sukses dalam jaminan kesehatan sedang di Indonesia belum. Contoh di Indonesia adalah Jaminan Kesehatan di Kabupaten Jembrana. Kondisi sekarang adalah tidak berjalan. Hal ini terjadi karena *political heavy*. Kebijakan public yang berhubungan dengan political. Ada tiga langkah policy development.

1. Problem solving
2. Komprehensif
3. Normative ini merupakan aspek legal yang harus dibuat.

Policy brief yang dibuat sebaiknya melihat sarannya. Ada contoh-contoh yang diberikan di kopi file.

Question:

1. Apakah policy brief yang dibuat harus sesuai dengan tujuan policy atau melihat problem?
2. Policy maker membuat kebijakan dalam bentuk policy brief bagaimana mengetahui efektifitasnya?
3. Benturan-benturan yang terjadi untuk esensi kebijakan seperti apa reviewnya?
4. Resistensi apakah masuk background of problem atau komponen tersendiri dalam 10 komponen policy brief karena belum ada pemetaan yang jelas tentang policy brief yang dibuat?
5. Apakah policy yang dibuat berhubungan dengan hokum atau regulasi yang ada?